

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi S. H. 2022. *Hukum keuangan negara*. Hlm. 13. Jakarta:Sinar Grafika.
- Alfin Sulaiman. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Hlm. 20. Bandung:PT Alumni.
- Andi Hamzah. 2020. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Hlm. 160. Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2021. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Hlm. 188-190. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberatan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Hlm. 4-6. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Hlm. 109. Bandung: Citra Aditya
- Bourne, H. R., & Vermillion, E. B. 2016. *Follow the Money: Funding Research in a Large Academic Health Center*. Lulu. Com, hlm. 4.
- Dellyana,Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Hlm. 34. Yogyakarta: Liberty.
- Edi Yunara. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*. Hlm. 1. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi 2014 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Hlm. 97. Refika Aditama.
- Erman Rajagukguk. 2001. *Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Hlm. 45. Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Hlm. 13. Jakarta:Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, S. H. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Hlm. 2. Jakarta:Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*. Hlm. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Hlm. 155. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2020 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Hlm. 67. Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hlm. 102. Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Muslih. 2013. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*,hlm. 4. Legalitas Edisi. Juni.
- M. Yahya Harahap dan P.A.F. Lamintang. 2017. *Hukum Acara Pidana – Teori dan Praktik di Pengadilan*. Hlm. 85-90. Rajawali Pers.
- M.Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Hlm. 210-215. Jakarta:Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Hlm. 157. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Hlm. 71. Jakarta:Kencana.
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakan hukum progresif*. Hlm. 20. Penerbit Buku Kompas.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 60.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.
- Satjipto Rahardjo, 2019, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hlm. 46. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Hlm. 28. Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Hlm. 82. Depok:PT. RajaGrafindo Persada..
- Syarifuddin & Mahfud. 2021. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Hlm. 98-105. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, H. M., & Sh, M. H. 2020. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Hlm. 20. Prenada Media.
- Tjandra, W. R., & Sh, M. 2006. *Hukum keuangan negara*. Hlm. 20. Grasindo.

- Tjandra, W. R., & SH, M. 2023. *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Hlm. 21. PT Kanisius.
- W. Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Hlm. 1-2. Jakarta:PT. Grasindo.
- Yenti Garnasih. 2020. *Kewenangan KPK Pasca Revisi Undang-Undang*. Hlm. 45. Jakarta:Sinar Grafika.
- Yenti Garnasih. 2021. *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi*. Hlm. 80-87. Rajawali Pers.

JURNAL

- Amrullah, R., & Pratama, R. G. (2023). IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT). *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 191-198. <https://doi.org/10.21831/jis.v3i1.100>.
- Andesa, 2025, Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran, jurnal hukum Justicia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Volume 1, No 01 <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/download/146/210/505>.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administratif Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>.
- Dandel, D. C. L. (2018). Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10).<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2174>.

- Dimiyati, A. R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 40-57. <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1915>.
- Harefa, B., & Syakina, N. Z. (2022). Problematika Izin Penyadapan Dewan Pengawas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(1), 15-25. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology>.
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com/>.
- Nafiysul Qodar, 2022, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", Merdeka, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-darikasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html>.
- Pujianti, M. S. R., Musyarri, F. A., & Gheosa, P. E. (2020). INTROSYSM: Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 43-58. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.207>.
- Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1), 47-57. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>.
- Raja, R. L. (2025). Menyoal Regulasi Perampasan Aset Sebagai Mitigasi Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU. No 20 Tahun 2001 Perspektif Asas Pengayoman Dan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 929-934. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.461>.
- Rena Yulia, "Efektivitas Penyitaan Aset dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 315–317.

- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser. *Volume*, 5, 199-212.
- Romli Atmasasmita, “Optimalisasi Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021), hlm. 219–224.
- Romli Atmasasmita, “Strategi Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 283–288.
- Rorong, V. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak. *Lex Et Societatis*, 3(7). <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9073>.
- Rorong, V. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak. *Lex Et Societatis*, 3(7). <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9073>.
- Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).
- Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83.
- Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008>.
- Wira Satya Widyatmoko, “Penyitaan aset oleh penyidik dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi,” *Dinamika Hukum & Masyarakat* 8, no. 1 (2025): 70–75.

INTERNET

Tindak Pidana menurut KBBI. Terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tindak>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Terkait Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Terkait Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Terkait Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana

